

Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Hilya

hilya9625@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Hadawiah

hadawiah.hadawiah@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Zelfia

Zelfia.zelfia@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang serta untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Desa Buntu Mondong menggunakan surat undangan sebagai media komunikasi yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan, BPD serta kepala Dusun untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa, serta Pemerintah Desa memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dengan mengadakan Musrembangdes sebagai media sosialisasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong belum terjalin dengan baik hal ini ditandai dalam penyebaran informasi tentang perencanaan pembangunan pemerintah Desa hanya disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Buntu Mondong masih Kurang.

Kata Kunci : Komunikasi, Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan

Abstract: *This study aims to describe the communication carried out by the Village Government in development planning in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency and to describe community participation in development planning in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Then in collecting data researchers used interviews, observation and documentation. In planning development, the Buntu Mondong Village Government uses invitation letters as a communication medium addressed to the sub-district government, BPD and hamlet heads to attend deliberations, and the Village Government facilitates development planning by holding Musrembangdes, as a socialization medium. The results of this study can be concluded that communication exists between the village government and the community in Buntu*

Mondong Village have not been well established, this is indicated by the dissemination of information about village government development planning only to certain parties. So that community participation in development planning in Buntu Mondong Village is still lacking.

Keywords: *Communication, Development Planning, Village government*

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan Desa merupakan suatu usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa, misalnya perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong, namun dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya komunikasi antara pemerintah Desa Buntu Mondong dan masyarakatnya.

Peran komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan perencanaan pembangunan di desa yang akan di laksanakan kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan di desa, terutama antara masyarakat dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambil keputusan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alvian Ade Rahman dari Universitas Negeri Sunan Ampel yang mengangkat judul “ Komunikasi Aparat Desa Dalam Penegelolaan Pembangunan Di Desa Banjerbondo Kecamatan Sidoarjo, . Penelitian ini mengkaji tentang proses Komunikasi yang dilakukan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Banjerbondo Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu pengumpulan data dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. disimpulkan bahwa Komunikasi Partisipatif adalah pola komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan di Desa Banjerbondo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara aparat Desa dan masyarakat dan mewujudkan peneglolaan pembangunan yang baik pula.

Oleh karena itu Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dengan ada partisipasi masyarakat dalam setiap proses dari

perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan efisien . Namun, pada kenyataannya banyak dari proses perencanaan pmbangunan di Desa belum terjadi proses komunikasi timbal balik antar pemerintah desa dan masyarakat setempat.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Pendekatan ini, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya yang mendeskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penulis terkait “Komunikasi Pemerintah Desa Dalam perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang , maka penelitian ini berlokasi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang . Dengan waktu penelitian yang digunakan yaitu 1 Bulan terhitung dari tanggal 25 Desember 2022 sampai 25 Januari 2023.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling , yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Informan yang dipilih merupakan pemerintah desa dalam hal ini Sekretaris Desa, kaur pembangunan anggota BPD .Kemudian Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemuda yang terlibat langsung dalam proses pembangunan

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu; tahap persiapan, pelaksanaan penelitian dan analisis data dan penyusunan laporan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu (1) Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh di lapangan yang bersumber dari informan yang di anggap relevan.(2) Data sekunder yaitu data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah

mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder merupakan data pelengkap untuk melengkapi data primer. Data sekunder dari penelitian ini meliputi : buku-buku panduan, dokumen-dokumen yang tersedia di kantor Desa Buntu Mondong.

Instrumen penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengenai komunikasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut : (1) wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. (2) Observasi atau pengamatan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. (3) Dokumentasi merupakan pengambilan data melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Reduksi data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (2) Reduksi data bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah di mengerti sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi. (3) Penarikan kesimpulan maka pada tahap ini peneliti harus menarik kesimpulan, atas objek kajiannya. Kesimpulan atas penelitian ini adalah hasil akhir atau klimaks dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Buntu Mondong

Komunikasi mempunyai pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintah termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan di raih, dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan. Untuk menjelaskan Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam membangun desa dalam mencapai tujuan dan saran pemerintah desa yang telah ditetapkan yaitu Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa diamati dari dua kriteria yaitu preventif, represif.

Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kalau pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, maka yang bertanggungjawab dalam hal perencanaan dengan komunikasi adalah kepala desa. Seorang komunikator atau kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, kepala desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan instansi desa yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada di Desa Buntu Mondong melalui musyawarah.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan yang dilakukan berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa itu sendiri dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Usulan yang disampaikan dalam perencanaan harus benar benar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komunikasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan sangat penting dalam membantu proses penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dimana pesan yang disampaikan dapat diterima dan dilakukan agar dapat tercapainya tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat haruslah terjalin dengan baik sehingga segala tujuan perencanaan pembangunan itu sendiri dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari Desa Buntu Mondong maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan jawaban yang disampaikan dari aparat desa dan masyarakat yang mendasarkan bahwa kurang terjalinnya komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan masyarakat, karena pemerintah desa kurang terbuka dalam hal proses perencanaan pembangunan dan hanya melibatkan sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu komunikasi antara aparat desa dan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi serta harus membangun komunikasi yang baik dengan para tokoh pemuda yang ada di Desa Buntu Mondong demi mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang baik akan membuat proses perencanaan pembangunan itu berjalan dengan baik. Terlebih lagi jika aparat desa di Desa Buntu Mondong dapat bekerja sama dengan tokoh tokoh yang ada di masyarakat maka tidak akan terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan kepala desa maupun perangkat desa. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti faktanya komunikasi antar perangkat desa dengan masyarakat masih kurang terjalin dengan baik sehingga perencanaan pembangunan kurang berjalan dengan lancar.

Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis mengenai bagaimana Komunikasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang, untuk mengetahui dan mengamati bagaimana tentang komunikasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa.

Di Desa Buntu mondong sendiri komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat masih kurang berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Buntu Mondong cenderung hanya memberikan informasi mengenai perencanaan pembangunan desa kepada perangkat desanya, sedangkan informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat terbatas yang mana informasi tersebut hanya diberikan kepada tokoh masyarakat yang dianggap penting saja dan tidak kepada seluru masyarakat Desa Buntu Mondong.

Dari hasil wawanca dan observasi yang di lapangan, dapat diperoleh beberapa bentuk komunikasi yang ada di Desa Buntu Mondong yaitu komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. Komunikasi terbuka merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang secara terbuka, yang mana informasi dan tindakan yang dilakukan secara nyata dan terbuka. Sedangkan komunikasi tertutup merupakan bentuk perilaku yang sangat berbeda dengan perilaku terbuka, komunikasi tertutup sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi terselubung dan tertutup yang mana tidak adanya unsur keterbukaan informasi yang diberikan oleh kepada orang lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitin melalui wawancara dan observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong belum terjalin dengan baik. Adanya komunikasi yang terbatas antara pemerintah desa dan masyarakat desa membuat terjadinya mis komunikasi antara pemerintah desa dan msyarakat yang menjadi faktor penghambat dari proses perencanaan pembangunan tersebut.

Selanjutnya pemerintah desa dalam proses pembangunan desa diharapkan segera memperbaiki komunikasi dalam hal ini antara pemerintah desa dan masyarakat serta tokoh tokoh masyarakat agar segala bentuk hambatan yang disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan kurangkan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa bisa terselesaikan dengan baik

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Buntu Mondong

Partisipasi merupakan kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program seuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam pembangunan masyarkat, akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, disamping itu patisipasi dapat juga

dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu proyek merupakan proyek pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pada program atau kegiatan tertentu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan, serta kontribusi langsung masyarakat. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah di paparkan sebelumnya dapat kembali diketahui bahwa tidak semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya diwakilkan pada beberapa pihak terkait sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan pada aspirasi yang dibawa pihak tersebut. Dalam proses perumusan masalah seharusnya masyarakat harus mampu ikut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi. Seharusnya masyarakat dijadikan sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek dari program kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri dan masyarakatpun akan sadar dan paham akan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya.

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan teori yang ada di Bab II Sherry R Arnstein (1969) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan perumusan masalah terhadap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan cita-cita dalam kelompok yang hendak dicapai. Sedangkan, menurut Isabandi Rukminto yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pemahaman masyarakat sangatlah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, karena dengan pemahaman yang baik maka masyarakat sendiri mengetahui tujuan dan fungsi dari apa yang mereka kerjakan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelaksanaan pada program tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan serta kontribusi langsung masyarakat. Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan ini tidak hanya usaha dari pemerintah

semanta ataupun masyarakat itu sendiri, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antar pemerintah dan masyarakat. Yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk desa maupun seluruh lapisan masyarakat itu sendiri.

keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa diharapkan agar usulan usulan yang nantinya dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan benar benar merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat sehingga hasil dari realisasi pembangunan yang telah dirumuskan bersama memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dengan adanya ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Peran proaktif dan dilakukan secara kolektif akan membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan keputusan pemerintah desa soal pelayanan publik. Aksi kolektif mendorong masyarakat untuk lebih siap untuk terlibat dalam proses partisipasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kemauan masyarakat Desa Buntu Mondong untuk terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah ada hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang diundang, sebagian mereka dapat menghadiri kegiatan tersebut, kemudian mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan ikut memberikan masukan terhadap berbagai rumusan usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang akan diajukan kepada pihak pemerintah.

Namun pada kenyataannya adapun dari hasil penelitian bahwa pihak masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan di Desa Buntu Mondong hanya para kepala dusun, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat saja. Padahal jika melihat panduan pelaksanaan musrenbang desa bahwa setiap unsur yang ada didalam masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam hal ini idealnya masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegiatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa bukan hanya berasal dari faktor masyarakat tetapi ada juga kelemahan dari pemerintah.

Seharusnya pemerintah desa Memberikan kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit pada tahun 1969 yang membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat yang mana masuk dalam tingkat *Delegated Power* atau yang biasa disebut mendelegasikan wewenang, pemerintah desa mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Buntu Mondong dalam perencanaan pembangunan desa sudah ada tetapi masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang mana pemerintah Desa Buntu Mondong hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat namun dapat juga kita lihat bahwa masyarakat yang hadir dalam perencanaan pembangunan sudah memperhatikan bentuk partisipasinya dengan cara memberikan usulan-usulan mengenai perencanaan pembangunan, maka tingkat partisipasi masyarakat desa Buntu Mondong masuk dalam tingkat partisipasi *Manipulation* berdasarkan tingkatan partisipasi yang dibagi oleh Sherry R Arnstein dalam teori partisipasi masyarakat yaitu pemerintah desa hanya memilih sebagian dari masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil penelitian dan wawancara maka kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui informasi mengenai komunikasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Mondong kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang adalah (1) Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong belum terjalin dengan baik hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat setempat mengenai kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa Buntu Mondong menggunakan surat undangan yang ditujukan kepada pihak tertentu. (2) Partisipasi masyarakat Desa Buntu Mondong dalam perencanaan pembangunan desa sudah ada bisa dilihat dari masyarakat yang hadir dalam perencanaan pembangunan desa turut memberikan masukan mengenai perencanaan pembangunan namun masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang mana pemerintah Desa Buntu Mondong hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadawiah, 2022. *Perilaku Organisasi*, Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknolgi
- Kessa, Wahyuddin, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta Pusat : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Daerah Tertinggal
- Majid, Abdul dan Rayusdawati, 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, Makassar: Pt Leutika Nouvalitera.
- Mukarom Zainal, 2020. *Teori-Teori komunikasi*, Bandung :Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Morissan, 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Nasution, Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan pengenalam teori dan dan penerapannya Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
- Nuruddin, 2019. *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*, Depok : Rajawali Pers
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
- Sjafrijal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Era Otonomi*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
- Taiwan, Adrian dan Muh. Yusuf, 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan : Literacy Institute*

Jurnal

- Alfiaturrahman, P. (2016). *Perencanaan Pembangunan Desa*. 2(2), 251–267.
- Londa, K. T. J. ., & Rembang, M. (n.d.). *Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Menginformasikan Program Badan Usaha Milik Desa Guaan Kecamatan Mootat*.
- ONNOA, R., & LONDA, J. M. R. V. Y. (2021). *Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud Rutli*. VII(106), 52–64.
- Nadriana, L. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia adalah negara*.01(2), 53–67.
- Parwati, D. (n.d.). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (Ylpi) Riau Universitas Islam Riau Konsentrasi : Humas*.
- Pratama, A. A. A. (2021). *Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Pembangunan Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)*.

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI Vol.5 No.3 2024
<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

Rompas, D. S. P. I., Si, M., Tulusan, D. F. M. G., & Si, M. (n.d.). *Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)*. 1–11.

Web

“Defenisi Pemerintah Desa”. https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014 di akses pada 9 september 2022 pada pukul 21.23 WITA

“DefenisiPerencanaanPembangunan”.<http://repository.ub.ac.id/8559/5/3.%20BB2%20II.pdf> di akses pada 11 September 2022 pada pukul 10.57 WITA

“Tujuan Pembangunan Desa “. https://pusbmtekpalira.com/tujuan_pembangunan-des/ di akases pada 9 semptenber 2022 pada pukul 20.28 WITA